

SAK-ETAP SEBAGAI SOLUSI OVERLOAD STANDAR AKUNTANSI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa

niluh.narsa@feb.unar.ac.id

Isnalita

Program Studi Akuntansi, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Small medium enterprises (SMEs) play strategic role as business entity in the economic development. General SAK is overload and burdensome to be used as guidance for SMEs in performing their accounting activity. SMEs demand a less complicated accounting standard than existing general SAK, yet fulfill the quality of financial reporting. Thus, it becomes a motivation to establish SAK ETAP. There are two purposes in this paper. Firstly, this paper is aimed to review how overload general SAK is and to understand the background of SAK ETAP establishment as well. Secondly, this paper is aimed to completed the teoritical review with conducting research to disclose the extent of SAK ETAP implementation of cooperation and also to investigate wheter the different perception is exist between cooperation actors and accountant academics. Using descriptive statistic analysis, result showed that the implementation level of SAK ETAP in East Java can be categorized as "low implemented". Further, using independent t-test as data analysis, result showed that there are differences in perception between cooperation actors group and accountant academics group. Another empirical finding on SAK ETAP stated by other researchers have also been disclosed in this paper.

Key words: accounting standard overload, cooperation, perception, SAK ETAP, SMEs.

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) merupakan pelaku bisnis yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. SAK Umum telah dirasa overload (memberatkan) bagi para pelaku UMKMK untuk digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan akuntansinya. Kebutuhan akan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana tetapi tetap memenuhi kaidah kualitas pelaporan keuangan telah menjadi motivasi utama atas diluncurkannya SAK-ETAP yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum. Artikel ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menelaah overload standar akuntansi serta mengetahui bagaimana latar belakang munculnya SAK-ETAP. Tujuan kedua adalah untuk melengkapi telaah teoretis dengan melakukan penelitian untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat keterterapan SAK-ETAP pada koperasi serta menyelidiki apakah terdapat perbedaan persepsi atas SAK-ETAP antara kelompok akuntan pendidik dengan pelaku koperasi. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterterapan SAK-ETAP pada koperasi di Jawa Timur masuk pada kategori 'Kurang Diterapkan'. Selanjutnya dengan menggunakan analisis data berupa *independent t-test* ditemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok pelaku koperasi dengan akuntan pendidik. Beberapa temuan riset empiris SAK-ETAP di Indonesia yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya juga turut dipaparkan.

Kata kunci: koperasi, overload standar akuntansi, persepsi, SAK-ETAP, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang

memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi sebuah negara (Siam dan Rahahleh, 2010; Bohusova dan Blaskova,

2012). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2014), tercatat bahwa jumlah UMKM dalam kurun waktu tahun 2006-2010 mengalami kenaikan sebesar 9,8%. Kemudian data tahun 2012, menunjukkan bahwa jumlah tersebut bertambah menjadi 56,3 juta unit usaha. Rincian UMKM tersebut rata-rata didominasi oleh usaha mikro sebesar 98,8%, usaha kecil sebesar 1% dan sisanya adalah usaha menengah. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah koperasi di Jawa Timur per Desember 2012 telah mencapai 29.267 unit dan meningkat menjadi 31.182 unit per Desember 2015, jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dibandingkan jumlah koperasi pada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Nilai kontribusi koperasi dan UMKM mencapai 57% dari Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Tidak mengherankan apabila selama ini koperasi dan UMKM disebut sebagai subjek vital dalam pembangunan perekonomian bangsa khususnya dalam hal peningkatan total PDB dan penyerapan tenaga kerja (Kementerian KUMKM, 2014). Koperasi merupakan bagian dari usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan undang-undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi merupakan "badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip akuntansi".

Bisnis dalam skala apapun, laporan keuangan berperan sangat penting di dalamnya. Begitu pula dengan koperasi, sebagai sebuah lembaga ekonomi, koperasi sudah dipastikan akan berhubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja mereka. Pemerintah Indonesia memang belum mengatur secara khusus kewajiban UMKM menyusun laporan keuangan, namun demikian Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tidak

langsung telah mengisyaratkannya melalui pasal 56 yang berbunyi "Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan yang diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham." (Sutarto *et al.*, 2008). Dengan demikian, bagi suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, tidak terkecuali usaha kecil ataupun menengah, diwajibkan menyusun laporan keuangan.

Standar akuntansi diperlukan sebagai pedoman atas penyusunan laporan keuangan agar mudah untuk dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Kebutuhan akan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana tetapi tetap memenuhi kaidah kualitas pelaporan keuangan bertujuan umum telah menjadi motivasi utama atas diluncurkannya SAK ETAP (IAPI, 2011). IAI merasa memiliki kewajiban untuk menyusun sebuah standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakteristik usaha skala kecil dan menengah agar *benefit* yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam menerapkan standar lebih besar daripada *cost* yang dikeluarkan (DSAK IAI, 2013). Terlebih lagi, akibat dilakukannya konvergensi IFRS terhadap standar akuntansi di Indonesia, maka PSAK nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang selama ini digunakan koperasi sebagai pedoman dalam kegiatan akuntansinya, tidak dapat lagi digunakan oleh koperasi.

Artikel ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menelaah *overload* standar akuntansi dan mengetahui bagaimana latar belakang munculnya SAK ETAP. Tujuan kedua dari artikel ini adalah untuk mengungkapkan hasil riset yang dilakukan penulis terkait implementasi SAK ETAP pada koperasi di Jawa Timur serta juga menginvestigasi apakah terdapat perbedaan persepsi terkait SAK ETAP antara kelompok pelaku koperasi dengan kelompok akuntan pendidik. Penelitian penerapan SAK ETAP pada entitas bisnis skala kecil dan menengah, termasuk koperasi, di Indonesia sampai saat ini masih sangat terbatas dan umumnya penelitian tersebut mengguna-

kan pendekatan kualitatif yang hanya melihat pada satu entitas koperasi. Selanjutnya, membandingkan persepsi antara kedua kelompok tersebut menarik untuk dilakukan. Para pelaku koperasi merupakan salah satu aktor paling penting dalam proses implementasi SAK-ETAP. Proses pengadopsian yang efektif akan memerlukan dukungan dan komitmen dari mereka termasuk salah satunya adalah persepsi yang baik atas SAK ETAP. Terlebih, merekalah aktor yang menggunakan SAK ETAP sehingga mereka paham dari sisi praktikal.

Sementara itu, di lain sisi pihak akademisi lebih paham dari sisi konseptual. Kalangan akademisi merupakan kalangan yang penting dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap standar akuntansi (Baresford, 1997; Jonas dan Young, 1998). Baresford (1997) serta Jonas dan Young (1998) mengungkapkan bahwa salah satu peran penting para akademisi adalah melakukan penelitian yang tepat dengan isu terkini sehingga penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar yang relevan dalam penyusunan standar baru. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalangan akademisi diharuskan paham dari sisi konseptual atau teoretikal.

Mengacu pada penjelasan singkat tersebut maka isu penerapan SAK ETAP pada koperasi merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tingkat keterterapan SAK-ETAP pada koperasi di Jawa Timur?; dan (2) apakah terdapat perbedaan persepsi antara pelaku koperasi dan akuntan pendidik terhadap penerapan SAK-ETAP?. Keterterapan yang ingin dievaluasi pada penelitian ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di SAK-ETAP dan tidak mendetail sesuai dengan kejadian-kejadian maupun akun-akun khusus yang hanya muncul pada koperasi karena pada dasarnya SAK-ETAP adalah untuk entitas apapun asal tidak memiliki akuntabilitas publik sehingga penerapan secara lebih detailnya akan tergantung dari karakteristik entitas bersangkutan.

TINJAUAN TEORETIS

Ruang Lingkup dan Isi SAK ETAP

SAK ETAP ditujukan untuk entitas yang (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika (1) telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal; (2) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat. Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan bahwa SAK-ETAP dapat diterapkan untuk entitas yang tertutup baik yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan perdata, bentuk usaha perorangan. Namun demikian entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tetap dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut, contohnya adalah Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan SAK Umum terlalu tinggi biayanya atau terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi (Wirahardja dan Wahyuni, 2009).

Bila dibandingkan dengan *IFRS for SMEs*, SAK-ETAP juga jauh lebih sederhana. Banyak yang diatur dalam *IFRS for SMEs* namun tidak diatur dalam SAK-ETAP. Hal itu dilakukan karena terdapat beberapa hal yang ada pada *IFRS for SMEs* tidak sesuai dengan karakteristik UMKM yang ada di Indonesia. Contohnya adalah tidak diatur mengenai *other comprehensive income*, *business combination*, hiperinflasi (Ram dan Newberry, 2013). SAK ETAP, dalam beberapa hal, memberi banyak kemudahan untuk UMKM. Secara kasat mata bisa dilihat melalui tebal halaman dari SAK ETAP yang hanya 100 halaman dengan terdiri dari 30

bab (Wirahardja dan Wahyuni, 2009). Tabel 1 berikut ini menjelaskan tentang pokok bahasan per bab SAK-ETAP. Tabel 1 menunjukkan bahwa SAK-ETAP adalah SAK Umum yang disederhanakan. Sama halnya dengan *IFRS for SMEs* yang juga merupakan penyederhanaan dari IFRS. SAK-ETAP merupakan pilihan alternatif standar akuntansi yang di dalamnya dilakukan penyederhanaan pengakuan, pengukuran, dan proses penyusunan, adanya pe-

ngurangan tingkat pengungkapan, serta pengaturan yang dilakukan di SAK Umum yang dianggap tidak relevan dengan kegiatan usaha ETAP dapat diabaikan.

Karakter dari SAK ETAP adalah: (1) berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, (2) sebagian besar pengukuran menggunakan kos historis (3) hanya mengatur transaksi umum yang terjadi pada ETAP, (4) tidak berubah dalam beberapa tahun kedepan.

Tabel 1
Pokok Bahasan Per Bab dalam SAK ETAP

Bab	Pokok Bahasan	Bab	Pokok Bahasan
Bab 1	Ruang Lingkup	Bab 16	Aset Tidak Berwujud
Bab 2	Konsep dan Prinsip Pervasif	Bab 17	Sewa
Bab 3	Penyajian Laporan Keuangan	Bab 18	Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi
Bab 4	Neraca	Bab 19	Ekuitas
Bab 5	Laporan Laba Rugi	Bab 20	Pendapatan
Bab 6	Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	Bab 21	Biaya Pinjaman
Bab 7	Laporan Arus Kas	Bab 22	Penurunan Nilai Aset
Bab 8	Catatan atas Laporan Keuangan	Bab 23	Imbalan Kerja
Bab 9	Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan	Bab 24	Pajak Penghasilan
Bab 10	Investasi pada Efek Tertentu	Bab 25	Mata Uang Pelaporan
Bab 11	Persediaan	Bab 26	Transaksi dalam Mata Uang Asing
Bab 12	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak	Bab 27	Peristiwa setelah Akhir Periode Pelaporan
Bab 13	Investasi pada Joint Venture	Bab 28	Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Bab 14	Properti Investasi	Bab 29	Ketentuan Transisi
Bab 15	Aset Tetap	Bab 30	Tanggal Efektif

Sumber: DSAK-IAI. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi

Cukup banyak instansi, badan dan atau lembaga yang memformulasikan definisi UMKM di Indonesia. Belum ada pembatasan atas definisi dan kriteria dari

UMKM, sehingga tidak ada keseragaman. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pemakaian kriteria dibuat sesuai kebutuhan lembaga atau instansinya masing-masing. Di seluruh dunia pun hampir bisa dipastikan bahwa masing-masing negara akan memiliki

definisi dan kriteria UMKM yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi masing-masing negara tersebut (Bunea *et al.*, 2012).

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tertuang dalam bagian I pasal 1 adalah sebagai berikut. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dan harus memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Tabel 2 berikut ini adalah rangkuman dari kriteria UMKM berdasarkan UU No. 8 Tahun 2008 yang ada pada bagian IV pasal 6. Kriteria Aset dan Omzet tersebut cukup salah satunya saja yang terpenuhi.

Tabel 2
Kriteria Aset dan Omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No.	Jenis Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omzet
1.	Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2.	Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 miliar
3.	Menengah	> 500 juta – 10 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: UU Nomor 8 Tahun 2008, bagian IV pasal 6.

Tabel 2 menunjukkan bahwa segala jenis usaha, berbentuk formal maupun non-formal, jika memenuhi salah satu dari kriteria aset maupun kriteria omzet, maka usaha tersebut dapat disebut sebagai UMKM. Namun, terlepas dari definisi mengenai UMKM sesuai UU tersebut, agaknya UMKM memiliki karakteristik yang hampir seragam (Kuncoro, 2000).

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Mayoritas UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, akses UMKM terhadap lembaga-lembaga kredit formal masih rendah. Akibatnya mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, bahkan rentenir. Ketiga, mayoritas bentuk UMKM masih informal, dalam arti mereka tidak mempunyai status badan hukum bahkan tidak berakta notaris. Menurut catatan BPS tahun 1995-an, dalam Kuncoro (2000) diketahui dari total perusahaan kecil sebanyak, 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta

notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT, CV, Firma, atau Koperasi).

Terkait Koperasi, seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, yang dimaksud dengan koperasi adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi” (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, 2014). Sebagai tambahan, karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah, anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota koperasi selain bertindak sebagai pemilik juga bertindak sebagai pengguna jasa koperasi (*the dual identity of the member*) (Sutarto, *et al.*, 2008).

Merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 84 dijelaskan bahwa saat ini terdapat empat jenis Koperasi, yaitu: (1) Koperasi Konsumen; (2) Koperasi Produsen; (3) Koperasi Jasa; dan (4) Koperasi Simpan Pinjam. Sesuai penjelasan pasal 84 ayat (4) di-

paparkan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang “menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota”.

Koperasi jenis ini memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman uang dengan prosedur yang mudah dengan tingkat bunga pinjaman yang relatif lebih ringan dibandingkan yang berlaku di pasar. Koperasi simpan pinjam menjadi alternatif pilihan yang jauh lebih baik bagi pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman seperti masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM sehingga diharapkan Koperasi Simpan Pinjam dapat mencegah para anggotanya maupun pihak lain untuk terlibat dalam jeratan kaum lintah darat. (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, 2014).

Standar Akuntansi untuk Koperasi

Standar akuntansi bagi Koperasi sebelum SAK ETAP muncul adalah PSAK Nomor 27 yakni tentang Akuntansi Perkerasian. Namun karena terdapat konvergensi dengan IFRS, PSAK tersebut tidak digunakan lagi sebagai standar akuntansi bagi Koperasi. Otorisasi pemberlakuan SAK ETAP sebagai standar akuntansi bagi Koperasi tertuang pada dua jenis dokumen, yakni Surat Edaran Deputy Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Sesuai surat edaran Deputy Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 bahwa sehubungan dengan perberlakuan IFRS maka tentitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada SAK ETAP. Sedangkan sesuai Permenkop Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 pada Bab I bagian Latar Belakang, otorisasi penetapan SAK ETAP pada Koperasi dijelaskan bahwa, standar akuntansi keuangan yang mengacu

pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu SAK ETAP dan SAK Umum. Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Penerapan SAK ETAP di Indonesia

Khafid (2010) menemukan bahwa kepatuhan KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) di Kota Semarang masuk dalam kategori cukup patuh, serta ditemukan pula bahwa penerapan PSAK No. 27 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha secara signifikan. Penelitian berikutnya, Sutarto *et al.* (2008) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK Nomor 27 sedangkan kesulitan pengukuran tidak berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan PSAK Nomor 27 serta penerapannya dapat membawa dampak positif bagi UMKM yang menerapkannya.

Selanjutnya terkait SAK ETAP, berbagai permasalahan dan kendala atas implementasi SAK ETAP telah terungkap melalui riset-riset empiris yang dilakukan di Indonesia. Rudiantoro dan Siregar (2011) menguji prospek SAK ETAP untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Data penelitian tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan responden 50 pengusaha UMKM yang berada di wilayah Jabodetabek. Ditemukan hasil empiris bahwa prospek penerapan SAK ETAP untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mungkin akan terhalangi karena rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP padahal responden UMKM dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Dari total 50 responden, hanya 32% (16 responden) yang mengaku pernah mengetahui atau mendengar SAK ETAP tersebut. Kemudian hanya sekitar 11 responden saja

yang pernah mendapatkan pelatihan terkait SAK ETAP. Terkait pengekplorasian faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM terhadap SAK ETAP, ditemukan bahwa jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif signifikan, lama usaha berdiri berpengaruh negatif signifikan, sedangkan latar belakang pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan.

Menindaklanjuti penelitian Rudiantoro dan Siregar (2011) tersebut, Supriyati dan Wulanditya (2012) melakukan uji hubungan antara dampak dari faktor-faktor eksternal dan internal para pelaku UMKM terhadap pemahaman atas SAK ETAP. Subyek riset dipilah menjadi beberapa grup, yaitu: UMKM bisnis individual, entitas UMKM yang telah memiliki status badan hukum, koperasi, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagai catatan, BPR merupakan salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik yang menerima otorisasi wajib untuk menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman dalam kegiatan akuntansinya. Hal tersebut tertuang pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU (Rachmawati, 2011).

Tidak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh Rudiantoro dan Siregar (2011), ditemukan bukti empiris bahwa faktor internal (jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman) lebih memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman pelaku UMKM atas SAK-ETAP. Ditemukan pula bahwa terdapat perbedaan persepsi antara grup pelaku UMKM. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: *legal policy* dan dukungan dari pihak otoritas. Hanya BPR dan Koperasi yang mendapatkan mandatori untuk menerapkan SAK ETAP terlebih kedua grup UMKM ini berbadan formal. Selain itu BPR dan koperasi juga memperoleh dukungan dari pihak otoritas, seperti rutin dilakukannya pelatihan untuk meningkatkan kualitas kegiatan akuntansi mereka.. Selanjutnya faktor kedua adalah kondisi keuangan. UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 200 juta per tahun merasa tidak perlu untuk

membuat laporan keuangan, alih-alih menerangkan SAK ETAP.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas Kurnianto *et al.* (2012) menggunakan metode *in-depth interview* untuk memahami kesiapan beberapa pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP. Ditemukan bahwa kendala UMKM adalah tidak memiliki laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP. Lalu diketahui juga UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik memiliki perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama. Selanjutnya, terdapat satu responden UMKM yang memiliki manajemen keuangan yang baik serta laporan keuangan yang telah berhasil mendapatkan kredit modal dari tiga bank sekaligus. Dapat disimpulkan bahwa memiliki dokumentasi kegiatan akuntansi yang baik, seperti dibuatnya laporan keuangan, dapat menjadikan UMKM lebih berkembang.

Dari hasil temuan empiris beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa SAK ETAP memiliki prospek yang bagus untuk dapat digunakan oleh para pelaku UMKM sebagai panduan dalam menyusun laporan kegiatan akuntansinya. Namun demikian tidak seluruh UMKM mampu untuk mendokumentasikan kegiatan akuntansinya dengan baik karena masih terdapat beberapa halangan termasuk salah satunya adalah karakteristik dari para pelaku UMKM yang umumnya tidak terlalu memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Berbeda dari beberapa penelitian tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat keterterapan koperasi, sebagai salah satu contoh UMKM, terhadap SAK-ETAP dengan menggunakan metode survey.

Teori Lensa dan Persepsi Terhadap SAK ETAP

Teori Model Lensa *Brunswick* (*Brunswick's Lens Model*) menjelaskan suatu konsep bahwa proses penilaian (*judgment*) seseorang didasarkan pada suatu titik referensi (*cues*). Sebagian besar penilaian merupakan

hasil dari perbandingan dengan titik referensi atau *cues* tersebut sehingga *judgment* dihasilkan dari serangkaian operasi atas informasi yang berkaitan dengan item-item informasi atau kejadian (Burnswik, 1943). Teori ini umumnya digunakan untuk menilai sebuah keadaan yang memerlukan penilaian yang mana penilaian itu sendiri dibuat berdasarkan sekumpulan petunjuk (*cues*) yang didapatkan dari lingkungan. Dalam penelitian ini, penerapan SAK-ETAP pada koperasi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diamati secara langsung. Dengan demikian para responden akan diminta untuk mengamati dan memberikan persepsinya melalui sekumpulan petunjuk (*cues*) yang dipecah menjadi tiga hal yakni pengetahuan tentang SAK-ETAP, pandangan terkait legalitas SAK-ETAP, dan pendapat mengenai penerapan SAK-ETAP.

Persepsi merupakan suatu konsep penting untuk memahami perilaku seseorang karena perilaku itu sendiri didasarkan pada persepsi mereka terhadap suatu realita, bukan hanya berdasarkan realita itu sendiri (Spencer-Rodgers *et al.*, 2007). Pembentukan persepsi dapat dikatakan merupakan langkah awal proses interaksi antara manusia dan lingkungannya karena persepsi yang dimiliki akan membimbing sikap dan tanggapan seseorang terhadap apa yang ada di lingkungannya (Chiaburu dan Harisson, 2008). Umumnya terdapat tiga faktor utama yang dapat memunculkan perbedaan persepsi, yakni faktor internal (dalam pemersepsi), faktor eksternal (situasi atau lingkungan), dan faktor objek yang dipersepsikan (*target*). Diefendorff dan Greguras (2003) menyatakan bahwa berbagai karakteristik pribadi dari pemersepsi akan memengaruhi bagaimana ia menginterpretasikan apa yang ia lihat.

Beberapa penelitian di luar Indonesia telah mengungkapkan bagaimana persepsi para pelaku SMEs terhadap *IFRS for SMEs*. Wyk dan Rossouw (2009) dengan menggunakan metoda survei menemukan bahwa sebanyak 45% pelaku UMKM di Afrika Selatan meyakini bahwa penerapan *IFRS for*

SMEs dapat mengurangi beban untuk menyiapkan pelaporan keuangan, namun sisanya mempersepsikan bahwa *IFRS for SMEs* masih terlalu overload bagi para pelaku UMKM sehingga diperlukan upaya penyederhanaan yang lebih lagi terkait aturan akuntansi bagi para pelaku UMKM disana. Selanjutnya di negara Turki Atik (2010) meneliti mengenai persepsi para pelaku UMKM (pemilik, manager maupun akuntan dari UMKM bersangkutan) atas diadopsinya *IFRS for SMEs*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 1,81% responden menyiapkan laporan keuangan berdasarkan *IFRS for SMEs* dan sebagian besar responden menyiapkan laporan keuangan berdasarkan aturan pajak. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena hanya 17,87% responden yang telah mengetahui mengenai *IFRS for SMEs*. Meski demikian 94,41% responden mendukung adanya pengadopsian standar tersebut dan 88,19% responden memiliki keinginan untuk menerapkannya namun lebih memilih sifatnya sukarela (*voluntary*) dibandingkan sebuah kewajiban (*mandatory*).

Masih di negara yang sama, Kilic *et al.* (2014) dengan menggunakan survei via telepon, menemukan bahwa sebagian besar para profesional akuntansi (pelaku UMKM) sadar dan mengetahui adanya proses adopsi *IFRS for SMEs* di negara mereka; memiliki tingkat informasi yang memadai mengenai *IFRS for SMEs*; telah mengikuti pelatihan tentang *IFRS for SMEs*. Selanjutnya Kilic *et al.* (2014) meneliti pula mengenai pengaruh dari beberapa faktor terhadap persepsi mereka atas *IFRS for SMEs*. Ditemukan bahwa sedikitnya pelatihan serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan merupakan hambatan utama dari implementasi *IFRS for SMEs* karena menyebabkan persepsi dari para pelaku UMKM atas *IFRS for SMEs* menjadi tidak baik.

Berpindah ke negara lain, Othcere dan Agbeibor (2012) menunjukkan bahwa para pelaku bisnis kecil di Ghana merasa tidak terlalu memiliki kebutuhan atas *IFRS for SMEs*. Hal itu disebabkan karena mereka

jarang atau tidak memiliki struktur dan aktivitas internasional sehingga tidak diminta untuk menyiapkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan secara internasional. Kemudian ditemukan pula bahwa beberapa karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, bentuk hukum, dan jumlah pemilik memiliki hubungan positif yang rendah terhadap kebutuhan bisnis kecil atas *IFRS for SMEs*. Di Indonesia terdapat satu penelitian yang meskipun tidak membahas persepsi terhadap SAK ETAP secara eksplisit, namun cukup memberikan hasil yang memberikan gambaran tentang begitu pentingnya UMKM memiliki laporan keuangan yang disusun dengan baik. Purwati *et al.*, (2014) meneliti tentang pengaruh dari konten informasi akuntansi UMKM terhadap proses pengambilan keputusan bisnis dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dipilihnya subjek penelitian berupa BPR yakni dengan responden spesifik berupa para analis investasi dari BPR bersangkutan adalah bukan tanpa alasan karena BPR merupakan bank yang umumnya menyalurkan dana bagi para pelaku UMKM. Dengan menggunakan metode survei, hasil penelitian menunjukkan bahwa segala informasi yang berkaitan dengan kondisi bisnis, terutama yang diperoleh dari laporan keuangan, akan menjadi pertimbangan bagi para analis investasi BPR untuk memutuskan penerimaan atau penolakan dana para UMKM. Selanjutnya ditemukan pula bahwa para analis investasi BPR masih memiliki pandangan bahwa umumnya laporan keuangan yang disiapkan oleh para UMKM belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yakni SAK ETAP.

Terakhir, Astutie dan Fanani (2016) meneliti mengenai persepsi dari para pemilik UMKM di beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Hasil menunjukkan bahwa intensi untuk mengadopsi SAK ETAP sangat dipengaruhi oleh usia dari UMKM bersangkutan, namun demikian masih banyak UMKM yang masih belum memahami SAK ETAP beserta pelaporan keuangan dengan menggunakan teknologi, terlepas dari be-

sarnya intensi mereka untuk mengadopsi SAK ETAP. Para responden UMKM memiliki persepsi bahwa penerapan SAK ETAP serta pelaporan keuangan berbasis teknologi masih dipertimbangkan sebagai sesuatu yang mahal. Mereka membutuhkan pelatihan dari para pembuat kebijakan.

Selain penginvestigasian persepsi terhadap para pelaku UMKM itu sendiri, terdapat pula penelitian yang menginvestigasi bagaimana persepsi para akuntan terkait penerapan dari *IFRS for SMEs*. Di Roma, Bunea *et al.* (2012) menemukan bahwa dari total sebanyak 190 akuntan Romanian, sebanyak 52,6% responden setuju untuk diadakannya sistem pelaporan keuangan yang lebih disederhanakan lagi bagi UKM. Namun hanya 4,2% responden setuju bahwa *IFRS for SMEs* cocok digunakan bagi UKM.

Perihal perbandingan persepsi antara pihak akademisi dan praktisi dalam hal akuntansi telah banyak diinvestigasi. Misalnya terhadap kemampuan menerima dan melakukan inovasi yang mana di dalamnya termasuk mengakui bahwa terdapat prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda untuk bisnis skala besar dan kecil di Amerika (Bean, 1989); terhadap konvergensi standar akuntansi (Rezaee *et al.*, 2010); terhadap akuntansi forensik (Rezaee dan Burton, 1997). Beberapa penelitian terdahulu tersebut memberikan hasil yang hampir seragam bahwa ditemukannya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak yakni para akademisi dan para praktisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bean (1989), misalnya, menemukan bahwa terdapat persepsi yang berbeda antara pihak akademisi dan praktisi terkait inovasi untuk membedakan prinsip akuntansi untuk bisnis skala besar dan kecil. Diketahui bahwa kontribusi terbesar yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah persepsi risiko dan variabel kepribadian. Terkait variabel kepribadian sebagai salah satu faktor yang memengaruhi persepsi individu, di penelitian lain, Pinasti (2007) menemukan bahwa latar belakang pendidikan memengaruhi persepsi pemilik UMKM terhadap penye-

lenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi. Sama halnya dengan temuan tersebut yang telah dijelaskan di atas bahwa Rudiantoro dan Siregar (2011) menemukan bahwa tingkat pendidikan terakhir berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM terhadap SAK ETAP. Tanpa mencoba melakukan uji hubungan untuk mengeksplorasi suatu faktor terhadap persepsi mengenai SAK ETAP, penelitian ini melakukan uji beda terkait persepsi kelompok akademisi dengan kelompok praktisi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis tunggal dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan persepsi antara kelompok akuntan pendidik dan pelaku koperasi terkait penerapan SAK-ETAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang merupakan data subjektif mengenai tingkat keterterapan SAK ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Timur serta pernyataan sikap, pemikiran, pandangan, dan pendapat berkaitan dengan penerapan SAK ETAP. Jenis kuesioner yang diberikan adalah kuesioner tertutup, yakni jenis kuesioner di mana responden hanya tinggal memilih jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner. Terdapat dua jenis kuesioner yaitu kuesioner keterterapan (untuk pelaku koperasi) dan kuesioner persepsi (untuk pelaku koperasi dan akuntan pendidik). Analisis data merupakan gabungan antara statistik deskriptif dan analisis uji beda yang mana dilakukan ketika menguji hipotesis mengenai perbedaan persepsi antara pelaku koperasi dan akuntan pendidik.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Respon-

den dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, pertama adalah pelaku koperasi (koperasi wanita usaha simpan pinjam) di Jawa Timur yang hadir pada acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan kedua adalah para akuntan pendidik yakni dosen akuntansi yang mengajar pada beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Kuesioner disebar secara random. Total kuesioner yang disebar adalah 150 buah, dengan rincian 50 buah kuesioner keterterapan dan 50 kuesioner persepsi (diberikan kepada 50 pelaku koperasi yang sama) serta 50 kuesioner persepsi untuk akuntan pendidik.

Pengukuran Variabel

Terdapat dua jenis variabel tunggal dalam penelitian ini, yakni: (1) tingkat keterterapan SAK ETAP pada koperasi; dan (2) persepsi pelaku koperasi dan akuntan pendidik terhadap SAK ETAP. Yang dimaksud dengan tingkat keterterapan pada penelitian ini adalah ukuran besarnya intensitas kesesuaian tata cara dan sistematika pelaporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP yang didasari pada empat prinsip.

Kuesioner keterterapan mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian milik Prayudi dan Narsa (2015). Kuesioner keterterapan terdiri dari 50 item pertanyaan yang terbagi berdasarkan indikator *treatment* prinsip pengakuan (35 item), pengukuran (2 item), pengungkapan (4 item), dan penyajian (9 item). Keseluruhan prinsip tersebut telah disesuaikan dengan definisi dan ketentuan yang ada dalam SAK ETAP serta buku Ilustrasi Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP (IAPI, 2011). Masing-masing item pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin yang dimulai dari gradasi sangat negatif hingga sangat positif (1-5). Variabel kedua adalah variabel persepsi yang dimaksud dengan persepsi pada penelitian ini adalah suatu sikap, pandangan, dan penilaian terhadap isu penerapan SAK-ETAP. Terdapat tiga indikator pada variabel persepsi ini, yaitu: pengeta-

huan tentang SAK ETAP, pandangan terhadap eksistensi dan legalitas SAK-ETAP, serta pendapat tentang penerapan SAK ETAP. Masing-masing item pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin pula. Kuesioner mengenai persepsi ini mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian milik Navarro-Garcia dan Bastida (2010), Mullerova *et al.*, (2010), dan Rezaee *et al.* (2010).

Teknik Analisis Data

Eksplorasi yang dilakukan terhadap variabel tingkat keterterapan serta variabel persepsi diawali dengan dilakukannya penggunaan teknik statistika deskriptif yakni dengan menentukan nilai rata-rata dari jawaban tiap item pertanyaan. Skor

tendensi sentral tersebut dihitung dengan membagi nilai total skor variabel dari tiap responden dengan jumlah skor ideal (skor maksimum yang dapat dicapai dalam pengisian kuesioner) dan dijadikan dalam bentuk persentase (Lihat Tabel 3). Persentase diperoleh tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria dalam bentuk skor persentase. Langkah selanjutnya dilakukan uji *independent t-test* untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni terkait uji beda atas persepsi dari kelompok akuntan pendidik dengan pelaku koperasi. Hipotesis dinyatakan terdukung apabila didapatkan nilai signifikansi $p < 0,05$. Sebelum uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji reliabilitas dengan menggunakan kriteria skor *alpha cronbach* minimal 0,6.

Tabel 3
Kriteria Keterterapan dan Kriteria Persepsi

Kriteria Variabel Keterterapan dan Variabel Persepsi	Interval Rata-rata Skor
Sangat Tidak Diterapkan/Sangat Tidak Setuju	0% - 20%
Tidak Diterapkan/Tidak Setuju	>20% - 40%
Kurang Diterapkan/Kurang Setuju	>40% - 60%
Diterapkan/Setuju	>60% - 80%
Sangat Diterapkan/Sangat Setuju	>80% - 100%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Standar Akuntansi (Umum?) Yang Berlebihan (*Overload*)

Standar akuntansi adalah standar yang mengatur penyajian informasi, pengukuran transaksi dalam laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan (Thompson dan Hurdman, 1983). Standar akuntansi merupakan masalah krusial dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Perkembangan lingkungan global dan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Semakin kompleks kegiatan usaha, maka standar akuntansi yang dikeluarkan juga akan menjadi semakin kompleks (Schuetze, 1991). Thompson dan Hurdman (1983) me-

nambahkan beberapa faktor lain yang menyebabkan standar akuntansi menjadi makin kompleks, yakni: (i) tuntutan dari para investor serta kreditor untuk memuaskan kepentingan mereka agar tidak dirugikan, (ii) aktivitas pemerintahan yang berusaha untuk melindungi kepentingan publik dengan mengeluarkan beberapa regulasi, serta yang terakhir (iii) munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan apa yang tidak perlu diungkapkan sehingga akuntan mengeluarkan terlalu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Akibatnya, beberapa pihak mengeluh bahwa standar akuntansi justru mendorong bertambah besarnya beban dalam penyajian

laporan keuangan, khususnya bagi perusahaan kecil (Kelley, 1982; Hepp dan McRae, 1983; Thompson dan Hurdman, 1983).

Menurut Hepp dan McRae (1982) kondisi-kondisi yang mencerminkan adanya *overload* standar antara lain: (1) standar yang terlalu banyak dan detail; (2) tidak ada standar yang tegas, membuat pemilihan suatu aplikasi menjadi sulit; (3) standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan akuntan publik; (4) standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara: a. entitas publik dan nonpublik, b. laporan keuangan tahunan dan interim, c. perusahaan-perusahaan besar dan kecil, d. laporan keuangan yang telah diaudit dan belum diaudit; (5) pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Fokus bahasan *overload* standar akuntansi yang dimaksud pada artikel ini adalah fenomena bahwa standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara entitas publik dan nonpublik yang mana lebih rincinya adalah untuk perusahaan besar dan kecil.

Isu tentang *overload* standar akuntansi telah lama diperdebatkan oleh berbagai grup (Thompson and Hurdman, 1983). AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) mulai menerima beberapa komplain bahwa standar akuntansi dirasa *overload* di tahun 1974 (Churchill dan Breda, 1984).

Puncaknya pada tahun 1978, yakni di pertemuan tahunan AICPA, saat itu dikatakan bahwa meskipun FASB (*Financial Accounting Standard Board*) telah memberikan pengecualian kepada beberapa perusahaan terkait *supplemental disclosure*, banyak pihak merasa bahwa GAAP (*General Accepted Accounting Principles*) tidak dapat diterapkan secara ekonomis pada jenis perusahaan yang lingkup usahanya mikro, kecil, dan menengah (Kelley, 1982; Thompson dan Hurdman, 1983). *Overload* standar akuntansi menempatkan UMKM pada posisi yang sulit

untuk berkompetensi (Kelley, 1982). Salah satu contoh yang mencerminkan bagaimana usaha badan penyusun standar di Amerika untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi perusahaan skala kecil dalam hal penerapan standar akuntansi adalah SFAS nomor 33 (tahun 1978) tentang *Financial Reporting and Changing Prices* (Kilic et al., 2014).

Selanjutnya, pada musim semi di tahun 1981, AICPA membentuk *Special Committee on Accounting Standards Overload*. Komite tersebut pada tahun 1982 menghasilkan beberapa rekomendasi dan simpulan tentatif. Salah satunya adalah bahwa komite menginginkan FASB untuk melakukan pertimbangan ulang dan segera melakukan aksi terkait standar akuntansi tertentu yang seharusnya tidak perlu memberatkan dan tidak mahal untuk diterapkan, termasuk salah satunya adalah bagi subjek perusahaan yang lingkupnya masih kecil (Kelley, 1982). Hepp dan McRae (1983) berpendapat bahwa problem *overload* standar akuntansi bagi SMEs harus diperhatikan dan dibahas secara sendiri serta terpisah oleh problem-problem *overload* standar akuntansi yang lain untuk subjek perusahaan besar (seperti akuntansi sewa). Menurut Wahdini dan Suhairi (2006); Coetzee (2007); Tudor dan Mutiu (2008); Thompson and Hurdman (1983), akibat yang ditimbulkan dari adanya *overload* standar akuntansi tidak hanya berdampak pada pihak yang harus membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi tersebut, namun juga pihak pengguna laporan keuangan seperti investor, manajer, dan akuntan yang akan mengaudit.

Penjelasan atas dampak negatif yang ditimbulkan dari *overload* standar akuntansi adalah sebagai berikut, (1) bagi para pelaku SMEs harus menanggung *cost* yang lebih besar dari *benefit* atas penerapan standar akuntansi tersebut, (2) bagi para pemakai (misal pihak perbankan, investor) umumnya akan bingung menghadapi banyaknya dan kompleksnya catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan sesuai yang

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku padahal mungkin mereka hanya butuh informasi spesifik atau tertentu saja misal besarnya laba, (3) bagi para manajer, mereka mungkin akan cenderung untuk mengubah praktik bisnis sedemikian rupa, yang akan menghasilkan efek yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, (4) terakhir bagi auditor, terdapat kemungkinan mereka akan kehilangan fokus dan akhirnya cenderung melupakan prosedur audit yang seharusnya dilakukan.

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjadi solusi atas permasalahan *overload* standar akuntansi, yang mana telah direkomendasikan oleh Komite Scott dalam Kelley (1982), adalah: (1) mempertahankan status quo, (2) mengembangkan dua jenis atau set dari standar akuntansi yang berlaku, (3) menyederhanakan standar akuntansi yang berlaku untuk seluruh entitas bisnis, (4) mengubah standar pelaporan auditor, (5) mengembangkan alternatif dari standar akuntansi yang berlaku.

Beberapa penelitian tentang *overload* standar akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain yang dilakukan oleh Nair dan Rittenberg (1982) memberikan hasil bahwa para akuntan publik dan manajer perusahaan di Amerika percaya akan timbul biaya yang lebih besar bagi UMKM untuk mengikuti SAK Umum serta diperlukannya SAK yang khusus bagi UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan Knutson, Dennis, dan Wichman (1985) menyimpulkan bahwa standar pengungkapan lebih penting bagi usaha besar daripada usaha skala kecil dan menengah. Dengan demikian, standar pengukuran dan pengungkapan yang sama tidak dapat diterapkan pada seluruh perusahaan, dan penerapan standar pengukuran serta standar pengungkapan yang sama akan memberatkan bagi UMKM. Wahdini dan Suhairi (2006) meneliti tentang persepsi akuntan di Indonesia terhadap *overload* standar akuntansi keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan akuntan pajak dan akuntan bank, hasil penelitian

menunjukkan bahwa kedua kelompok akuntan tersebut memiliki persepsi yang sama bahwa SAK yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia memberatkan bagi UMKM. Manfaat penyusunan laporan keuangan jauh lebih dirasakan oleh usaha besar daripada UMKM karena UMKM harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan menyusun laporan keuangan.

Latar Belakang Lahirnya SAK ETAP

Menanggapi hasil dari diskusi yang telah lama ramai dibicarakan terkait terjadinya *overload* standar akuntansi serta banyaknya keseragaman hasil penelitian terkait *overload* standar akuntansi bagi UMKM, IASC (*International Accounting Standard Committee*) sebagai badan penyusun standar akuntansi Internasional sebelum IASB (*International Accounting Standard Board*) muncul, mulai mengembangkan sebuah standar yang diharapkan dapat menjadi solusi atas hal tersebut. Tahun 2001 adalah tahun dimana *IFRS for SMEs* mulai dikembangkan. *IFRS for SMEs* disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai alternatif dari standar yang telah ada. Indonesia juga menerbitkan standar serupa, yaitu SAK-ETAP. Sebelum SAK ETAP diterbitkan, UMKM di Indonesia menggunakan SAK Umum sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Di satu sisi mereka menginginkan laporan keuangan yang sesuai standar, namun di sisi lain mereka menghadapi hambatan dalam pengaplikasian SAK Umum terkait dengan kompleksitasnya sehingga menimbulkan *cost* yang besar apabila tetap diterapkan (Bunea, *et al.*, 2012; Tudor dan Mutiu, 2008; Wahdini dan Suhairi, 2006). Alasan awal dari disusunnya SAK-ETAP merupakan salah satu bentuk respon IAI atas diperlukannya suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana tetapi tetap memenuhi kaidah kualitas pelaporan keuangan yang bertujuan umum. Pada akhirnya pun penerbitan SAK-ETAP ini merupakan salah satu bentuk program

konvergensi standar akuntansi di Indonesia dengan IFRS (Wirahardja dan Wahyuni, 2009).

Keterterapan SAK ETAP Pada Koperasi

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian terkait keterterapan SAK ETAP pada koperasi serta persepsi para pelaku koperasi dan akademisi terhadap SAK ETAP. Total kuesioner yang diolah lebih lanjut adalah 120 kuesioner dengan rincian 40 kuesioner keterterapan serta 40 kuesioner persepsi dari pelaku koperasi dan 40 kuesioner persepsi dari akuntan pendidik. Dari 100 kuesioner (persepsi dan keterterapan) yang disebar ke 50 responden pelaku koperasi yang sama, 49 kuesioner kembali, namun hanya 40 yang dapat diolah. Selanjutnya dari 50 kuesioner persepsi yang disebar ke 50 responden akuntan pendidik, 46 kuesioner kembali, dan hanya 40 kuesioner yang dapat diolah.

Demografi terkait koperasi adalah berasal dari 18 kota/kabupaten yang tersebar di Jawa Timur, lama berdiri koperasi minimal adalah dua tahun, paling lama adalah lima tahun, dan mayoritas sebanyak 27 koperasi (67,5%) telah berdiri selama tiga tahun. Mayoritas koperasi responden penelitian ini memiliki anggota sebanyak 50-79 anggota yakni sebanyak 21 koperasi (52,5%). Berikutnya untuk kelompok akuntan pendidik sebanyak 27 responden (67,5%) berjenis kelamin wanita dan sisanya adalah pria.

Mayoritas pengalaman mengajar responden adalah 11-15 tahun yakni sebesar 13 responden (32,5%), selanjutnya 1-5 tahun sebanyak 11 responden (27,5%), dan masing-masing 8 responden memiliki pengalaman mengajar selama 6-10 tahun dan lebih dari 15 tahun. Selanjutnya demografi terkait pelaku koperasi akan disampaikan di bagian penjelasan berikut bersamaan dengan analisis hasil yang diperoleh.

Tabel 4 berikut ini menjelaskan tentang tingkat keterterapan SAK-ETAP pada koperasi sesuai dengan hasil penelitian ini

berdasarkan empat prinsip yang menjadi indikator untuk variabel keterterapan. Pertama, untuk indikator prinsip pengakuan, diperoleh interval skor 48,8% ('Kurang Diterapkan'). Analisis terhadap jawaban terkait prinsip keuangan diketahui bahwa berdasarkan SAK-ETAP, untuk laporan posisi keuangan disebutkan bahwa terdapat sepuluh akun minimal yang tercakup pada laporan tersebut, yaitu: (a) kas dan setara kas; (b) piutang usaha dan piutang lainnya; (c) persediaan; (d) investasi pada properti; (e) aset tetap; (f) aset tidak berwujud; (g) utang usaha dan utang lainnya; (h) aset dan kewajiban pajak; (i) kewajiban diestimasi; (j) ekuitas.

Dari kesepuluh jenis akun ini ternyata hanya kas dan piutang yang dicatat dengan baik oleh koperasi, sedangkan untuk delapan akun lainnya yakni persediaan, investasi pada properti, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha, aset dan kewajiban pajak, dan kewajiban diestimasi diketahui bahwa akun-akun tersebut tidak dicatat oleh koperasi. Untuk laporan laba rugi, berdasarkan SAK ETAP akun-akun yang minimal harus terdapat di dalamnya adalah: (a) pendapatan; (b) beban keuangan; (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; (d) beban pajak; (e) laba atau rugi neto.

Beban keuangan di sini dibagi menjadi dua yaitu beban operasional dan beban non operasional. Diketahui bahwa dari lima jenis akun tersebut, hanya dua yang dicatat dengan baik, yaitu beban operasional dan laba atau rugi bersih, sedangkan sisanya hampir tidak pernah bahkan tidak pernah dicatat oleh sebagian besar responden. Hal ini konsisten dengan temuan yang ada pada akun-akun di laporan perubahan posisi keuangan yang mana diketahui bahwa akun aset dan kewajiban pajak serta aset tetap tidak pernah dicatat oleh koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini, maka sudah pasti untuk akun beban pajak dan beban non-operasional (beban penyusutan) juga tidak pernah dicatat.

Tabel 4
Tingkat Keterterapan SAK ETAP Pada Koperasi

No.	Keterangan		Skor Jawaban					Skor Nyata	Skor Ideal	Interval	Kategori
			TP (1)	HTP (2)	K (3)	SR (4)	SL (5)				
1.	Indikator Prinsip Pengakuan	Frekuensi	742	51	178	101	328	1400	7000	0,488	Kurang Diterapkan
		Total Skor	742	102	534	404	1640	3422			
2.	Indikator Prinsip Pengukuran	Frekuensi	27	4	14	8	27	80	400	0,610	Diterapkan
		Total Skor	27	8	42	32	135	244			
3.	Indikator Pinsip Pengungkapan	Frekuensi	21	11	38	39	51	160	800	0,736	Diterapkan
		Total Skor	42	22	114	156	255	589			
4.	Indikator Prinsip Penyajian	Frekuensi	53	11	77	67	152	360	1800	0,907	Sangat Diterapkan
		Total Skor	53	22	231	268	760	1634			
5.	Variabel Keterterapan	Frekuensi	843	77	307	215	558	2000	10000	0,556	Kurang Diterapkan
		Total Skor	843	154	921	860	2790	5568			

Kemudian untuk akun maupun non akun yang ada di laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang dicatat dengan baik hanya: (1) distribusi ke pemilik ekuitas; (2) kas keluar yang dibayarkan untuk anggota; dan (3) kas masuk yang didapatkan dari pinjaman selain pihak bank.

Pada indikator prinsip pengukuran, diperoleh interval skor sebesar 61% ('Diterapkan'). Perolehan skor ini hampir mendekati kriteria 'Kurang Diterapkan'. Item pertanyaan yang terdapat pada indikator ini hanya ada dua, yakni: (1) biaya historis; dan (2) nilai wajar. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan SAK ETAP, dasar pengukuran yang umum digunakan sebagian besar adalah biaya historis dan sebagian kecil adalah nilai wajar. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar hanya diperuntukkan untuk akun-akun tertentu seperti investasi, efek utang, efek ekuitas, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Oleh karena sebagian besar pelaku koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, tidak memiliki latar belakang akuntansi dan belum pernah mendapatkan pelatihan SAK

ETAP, maka dapat dipastikan mereka tidak memiliki pemahaman mendasar tentang biaya historis dan nilai wajar. Pemberian penjelasan secara singkat pada kuesioner tentang dua jenis pengukuran nampaknya tidak terlalu membantu karena diketahui bahwa responden (17 orang) lebih banyak memilih kategori 'Selalu' untuk nilai wajar dibandingkan biaya historis (10 orang), padahal kemungkinan besar koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini dipastikan sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek untuk diperdagangkan (*trading securities*).

Selanjutnya untuk indikator prinsip pengungkapan, skor interval yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dua prinsip indikator sebelumnya yaitu sebesar 73,6% ('Diterapkan'). Syarat pengungkapan berdasarkan SAK-ETAP setidaknya hanya memenuhi dua hal yakni: (1) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan serta kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan dan (2) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK-ETAP dan juga informasi tambahan tetapi tidak disajikan dalam la-

poran keuangan. Sebagian besar koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini dalam membuat catatan atas laporan keuangannya telah mengungkapkan dengan cukup baik sesuai dengan SAK ETAP. Dari empat butir pertanyaan yang ada pada indikator ini, pengungkapan yang paling banyak dilakukan oleh sebagian besar responden pelaku koperasi adalah pengungkapan informasi domisili dan bentuk hukum. Sedangkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu serta informasi tambahan yang dipandang relevan, sebagian besar responden memilih jawaban kadang-kadang.

Indikator terakhir yakni indikator prinsip penyajian mendapatkan skor interval paling tinggi dibandingkan indikator-indikator lainnya, yaitu sebesar 90,7% ('Sangat Diterapkan'). Diketahui bahwa hanya dua jenis laporan keuangan yang rutin disajikan oleh sebagian besar koperasi, yakni laporan perubahan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi (jika pada koperasi disebut laporan sisa hasil usaha). Sesuai SAK-ETAP, penyajian laporan keuangan yang lengkap adalah terdiri dari lima jenis laporan keuangan. Tiga laporan keuangan lain yang penyajiannya jarang dilakukan oleh sebagian besar koperasi adalah laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas diketahui merupakan jenis laporan keuangan yang paling jarang dibuat oleh responden koperasi pada penelitian ini. Selain itu didapatkan hasil pula bahwa: (1) penyajian pemisahan klasifikasi akun berdasarkan lancar atau tidaknya; (2) penyajian laporan keuangan minimal satu tahun sekali; dan (3) penyajian laporan keuangan komparatif dengan tahun sebelumnya, telah dilakukan dengan baik oleh sebagian besar koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi telah memiliki pemahaman yang cukup memadai tentang prinsip penyajian secara garis besar.

Secara keseluruhan jika dilihat dari variabel keterterapan, hasil interval skor yang didapat adalah sebesar 55,8% yang masuk pada kategori 'Kurang Diterapkan'. Menengok pada pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi cukup menerapkan SAK-ETAP namun hanya pada prinsip penyajian dan prinsip pengungkapan, sedangkan untuk prinsip pengakuan dan pengukuran belum diterapkan dengan baik.

Alasan dari sedikitnya akun maupun non-akun serta juga prinsip-prinsip yang diterapkan berdasarkan SAK ETAP adalah karena jenis koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam.

Hal penting lain yang ditemukan adalah sebagian besar koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini tidak pernah mencatat akun utang bank, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tidak pernah memperoleh akses dari pihak bank untuk dapat bantuan dana. Terakhir, dari data demografi diketahui sebanyak 25 responden (62,5%) hanya berpendidikan terakhir SMA dan sebanyak 19 responden (47,5%) tidak memiliki latar belakang akuntansi. Selain itu separuh responden belum pernah mendapatkan pelatihan tentang SAK-ETAP, sehingga kembali lagi, selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kemungkinan pedoman SAK-ETAP masih memberatkan para pelaku koperasi karena hambatan dari karakteristik pelaku koperasi.

Persepsi Pelaku Koperasi dan Akuntan Pendidik Terhadap Penerapan SAK ETAP

Tabel 5 dan 6 berikut ini memaparkan bagaimana persepsi pelaku koperasi dan akuntan pendidik secara keseluruhan dan berturut-turut untuk tiga indikator yang ada pada variabel persepsi itu sendiri. Indikator I adalah indikator pengetahuan, indikator II adalah indikator pandangan terkait legalitas dan indikator III adalah indikator pendapat.

Kelompok responden pelaku koperasi, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 variabel persepsi masuk pada kategori 'Setuju' dengan skor interval 0,726 sedangkan untuk kelompok akuntan pendidik juga masuk pada kategori 'Setuju dengan skor

interval 0,754. Selanjutnya untuk kelompok pelaku koperasi, berturut-turut untuk indikator I, II, dan III skor interval adalah sebesar 0,680; 0,706; 0,755 yang kesemuanya masuk pada kategori 'Setuju'.

Tabel 5
Persepsi Pelaku Koperasi Terhadap Penerapan SAK ETAP

No.	Keterangan	Skor Jawaban					Skor Nyata	Skor Ideal	Interval	Kategori Persepsi	
		STS (1)	TS (2)	K (3)	S (4)	SS (5)					
1.	Variabel	Frekuensi	1	68	126	306	59	560	2800	0,726	Setuju
	Persepsi	Total Skor	1	136	378	1224	295				
2.	Indikator I	Frekuensi	1	30	64	98	7	200	1000	0,680	Setuju
		Total Skor	1	60	192	392	35	680			
3.	Indikator II	Frekuensi	0	19	29	61	11	120	600	0,706	Setuju
		Total Skor	0	38	87	244	55	424			
4.	Indikator III	Frekuensi	0	19	33	147	41	240	1200	0,775	Setuju
		Total Skor	0	38	99	588	205	930			

Tabel 6
Persepsi Akuntan Pendidik Terhadap Penerapan SAK ETAP

No.	Keterangan	Skor Jawaban					Total	Skor Ideal	Interval	Kategori Persepsi	
		STS (1)	TS (2)	K (3)	S (4)	SS (5)					
1.	Variabel Persepsi	Frekuensi	0	64	117	263	116	560	2800	0,754	Setuju
		Total Skor	0	128	351	1052	580	2111			
2.	Indikator I	Frekuensi	0	24	25	88	63	200	1000	0,790	Setuju
		Total Skor	0	48	75	352	315	790			
3.	Indikator II	Frekuensi	0	21	59	28	12	120	600	0,651	Kurang Setuju
		Total Skor	0	42	177	112	60	391			
4.	Indikator III	Frekuensi	0	2	30	128	80	240	1200	0,838	Setuju
		Total Skor	0	4	90	512	400	1006			

Kelompok akuntan pendidik, sesuai yang ada pada Tabel 6, berturut-turut adalah sebesar 0,790; 0,651; 0,838 yang mana indikator I dan III masuk pada kategori 'Setuju' namun 'Kurang Setuju' untuk indikator II. Beberapa hasil menarik yang terungkap melalui eksplorasi statistik deskriptif di antaranya adalah: (a) sebanyak tujuh (20%) pelaku koperasi tidak mengetahui bahwa terdapat standar akuntansi sebagai pedoman bagi Koperasi sedangkan seluruh akuntan pendidik yakni sebanyak 40 responden (100%) mengetahuinya; (b) seba-

nyak 23 (52,5%) responden akuntan pendidik tidak setuju bahwa SAK-ETAP merupakan sebuah pedoman yang baku dalam penyusunan laporan keuangan bagi koperasi. Sebaliknya untuk kelompok pelaku koperasi, yang juga tidak setuju terhadap legalitas jumlahnya lebih kecil dibandingkan kelompok akuntan pendidik yakni sebanyak 15 responden pelaku koperasi (38%); (c) kemampuan koperasi dalam melakukan penilaian kinerja usaha serta dalam melakukan evaluasi untuk periode yang akan datang akan semakin meningkat, diketahui

bahwa jumlah responden pelaku koperasi yang tidak setuju akan hal tersebut adalah 10 responden (25%) yang mana lebih banyak dibanding kelompok responden akuntan pendidik yang hanya 2 responden (5%).

Hasil Uji Hipotesis

Dengan menggunakan *independent t-test*, telah didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok pelaku koperasi dengan kelompok akuntan pendidik, sehingga hipotesis yang telah dirumuskan tidak ditolak dengan tingkat kepercaya-

yaan 95%. Tabel 7 menyajikan rincian atas hasil signifikansi uji-t adalah sebagai berikut: (1) indikator pengetahuan terhadap SAK ETAP diperoleh hasil $p < 0,000$ (terdapat perbedaan), (2) indikator pandangan terhadap eksistensi dan legalitas SAK ETAP diperoleh hasil $p > 0,102$ (tidak terdapat perbedaan), (3) indikator pendapat terhadap SAK ETAP diperoleh hasil $p < 0,013$ (terdapat perbedaan), (4) variabel persepsi diperoleh hasil $p < 0,010$ (terdapat perbedaan), sehingga dengan demikian hipotesis penelitian ini terdukung.

Tabel 7
Hasil Independent-Sample T-Test

No.	Keterangan	Kelompok	Mean	Std.	Sig.	Hasil
1.	Indikator Pengetahuan	PK	3,400	0,597	0,000	Terdapat perbedaan
		AP	3,950	0,438		
2.	Indikator Legalitas	PK	3,533	0,776	0,102	Tidak terdapat perbedaan
		AP	3,258	0,709		
3.	Indikator Pendapat	PK	3,875	0,631	0,013	Terdapat perbedaan
		AP	4,191	0,468		
4.	Variabel Persepsi	PK	3,632	0,542	0,010	Terdapat perbedaan
		AP	3,906	0,357		

Keterangan: PK= Pelaku Koperasi; AP= Akuntan Pendidik

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya yang mana telah dibahas pada bagian telaah literatur, maka dapat disimpulkan bahwa SAK ETAP sebenarnya telah berhasil berperan sebagai alternatif standar yang lebih sederhana, namun hanya untuk jenis UMKM yang telah berbadan hukum, menerima mandatori untuk menggunakan SAK ETAP, serta sering menerima pelatihan mengenai SAK ETAP. Harus disadari bahwa semua UMKM belum mampu untuk menerapkannya. Bahkan pengetahuan terkait akuntansi dasar pun mayoritas pelaku UMKM masih tidak memilikinya.

Hal tersebut khususnya terjadi pada UMKM yang omzetnya masih di kisaran lingkup usaha mikro serta masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi para pelaku koperasi pada umumnya sudah

menganggap bahwa laporan keuangan itu penting, namun karena masih sedikitnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki, maka mereka memiliki pemikiran yang kurang tepat mengenai catatan keuangan usaha, serta perlakuan yang tidak tepat antara pengeluaran dan harta pribadi dengan pengeluaran dan harta usaha. Terdapat kemungkinan bahwa apabila mereka, minimal saja, melakukan pencatatan akuntansi saja dengan baik, akan terbuka peluang bagi mereka untuk dapat menerima dana kredit dari lembaga keuangan formal.

Adanya kecenderungan entitas bisnis skala kecil dan menengah tidak memiliki laporan yang formal dan sistematis atas kinerja perusahaan mereka, dapat disebabkan karena entitas bisnis skala kecil dan menengah tidak memerlukan adanya pengawasan yang ketat, dalam artian bahwa mereka tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan sehingga umumnya mereka

baru akan membuat laporan keuangan yang baku jika memang diperlukan dan diminta. Seperti misalnya untuk kasus pada koperasi, sebagai salah satu jenis entitas bisnis skala kecil dan menengah yang berbadan hukum, pembuatan laporan keuangan yang baku umumnya baru akan dibuat saat meminta akses pendanaan ke bank, saat diminta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana atau hibah yang diberikan, dan saat laporan keuangan mendapat otorisasi untuk diaudit. Terdukungnya hipotesis penelitian ini selaras dengan yang telah disampaikan Robbins dan Judge (2007) mengenai persepsi. Mereka menyatakan bahwa persepsi masing-masing individu akan berbeda ketika menghadapi suatu permasalahan tertentu. Perbedaan persepsi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor pada pemersepsi, faktor dalam situasi, dan faktor pada target.

Penyebab adanya perbedaan persepsi ini adalah lebih karena faktor pada pemersepsi atau karakteristik pribadi dari masing-masing kelompok responden. Berbagai karakteristik pribadi dari pemersepsi akan memengaruhi bagaimana ia menginterpretasikan apa yang ia lihat yang mana dalam hal ini adalah penerapan SAK ETAP. Diefendorff dan Greguras (2003) menyatakan bahwa berbagai karakteristik pribadi dari pemersepsi akan memengaruhi bagaimana ia menginterpretasikan apa yang ia lihat. Sehingga dengan demikian, interpretasi yang berbeda atas suatu hal yang sama dapat dihasilkan karena perbedaan karakteristik individual dalam proses pembentukan. Hasil ini senada dengan temuan dari penelitian Pinasti (2007) yang menunjukkan hasil bahwa latar belakang pendidikan dan adanya informasi mengenai akuntansi memengaruhi persepsi subyek penelitian terhadap penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi. Penelitian Rudiantoro dan Siregar (2011) menunjukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir berpengaruh signifikan terhadap pemahaman responden terkait SAK ETAP. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden pelaku koperasi berpendidikan terakhir SMA (62,5%), tidak memiliki latar belakang akuntansi (44,7%), serta belum pernah mendapatkan pelatihan SAK ETAP (50%) sehingga menyebabkan mereka tidak mengerti dengan benar bagaimana penerapan SAK ETAP. Hal tersebut tentu berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh akuntan pendidik. Kelompok akuntan pendidik lebih paham dari segi konseptual, dalam arti mereka lebih paham secara teoritis tentang SAK-ETAP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) tingkat keterterapan SAK ETAP masuk pada kategori 'Diterapkan' untuk prinsip pengungkapan dan penyajian. Untuk prinsip pengakuan dan pengukuran, meskipun hasilnya masuk pada kategori Kurang Diterapkan, hal itu lebih disebabkan karena banyak akun-akun khusus yang disyaratkan minimal ada di laporan keuangan oleh SAK ETAP, tidak terjadi pada kegiatan akuntansi Koperasi; (b) ada perbedaan persepsi antara kelompok pelaku koperasi dengan kelompok akuntan pendidik. Kelompok akuntan pendidik memiliki persepsi yang lebih tinggi (setuju) dibandingkan kelompok pelaku koperasi dalam hal penerapan SAK ETAP. Namun demikian terkait indikator legalitas, kelompok akuntan pendidik memiliki persepsi yang lebih rendah (kurang setuju) dibandingkan kelompok pelaku koperasi.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan kuesioner sebagai metoda pengumpulan data untuk mengungkapkan tingkat keterterapan terhadap SAK ETAP rentan terhadap resiko berupa bias keinginan sosial, bias respon, bias motif konsistensi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau melengkapi proses pengumpulan data dengan metode lain misal dengan dianalisisnya laporan keuangan satu persatu dan juga wawancara.

Kedua, tingkat keterterapan yang diungkap pada penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak mencoba menguji secara empiris atas hasil yang diperoleh. Berdasarkan prediksi yang diperoleh bahwa SAK ETAP kemungkinan masih *overload* bagi beberapa jenis UMKM, maka penelitian selanjutnya dapat mencoba mengkaitkan tingkat keterterapan yang diperoleh dengan karakteristik UMKM itu sendiri. Ketiga, penelitian ini menggunakan subjek penelitian berupa koperasi. Diketahui bahwa UMKM itu sendiri memiliki banyak jenis asal sesuai dengan karakteristik UMKM itu sendiri. Koperasi hanya salah satunya, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian lain. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengaitkan atau melakukan uji hubungan antara persepsi dengan tingkat keterterapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutie, Y. P. dan B. Fanani. 2016. Small to Medium-Sized Enterprises and Their Financial Report Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues* 6(S4): 36-45.
- Atik, A. 2010. SME's Views on the Adoption and Application of "IFRS for SMEs" in Turkey. *European Research Studies* XIII(4): 19-31.
- Bean, L. G. 1989. An Examination of Status-Risk and Personality Variables of Practicing Public Accountants and Accounting Academicians as Explanations of Receptivity/Resistance to Innovations. Disertasi. Faculty of Economics University of Arkansas. Fayetteville.
- Bohusova, H. dan V. Blaskova. 2012. In What Ways are Countries Which Have Already Adopted IFRS for SMEs Different?. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 60(2): 37-44
- Brunswik, E. 1943. Organic Achievement and Environmental Probability. *Psychological Review* 50: 255-272.
- Bunea, S., M. Sacarin dan M. Minu. 2012. Romanian Professional Accountants Perception on the Differential Financial Reporting For Small And Medium-Sized Enterprises. *Accounting and Management Information Systems* 11(1): 27-43.
- Chiaburu, D. S. dan D.A. Harisson. 2008. Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta-Analysis of Co-worker Effect on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance. *Journal of Applied Psychology* 93(5): 1082-1103.
- Churchill, N. C. dan M.F. Van Breda. 1984. Standards Overload and Differential Reporting. *Working Papers*. Paper 64.
- Coetzee, S. 2007. IFRS for SMEs IS small, small ENOUGH? *Accountancy SA* (5): 32-38.
- Diefendorff, J. M. dan G. J. Greguras. 2003. Antecedents and Consequences of Emotional Display Rule Perceptions. *Journal of Applied Psychology* April (2003): 284-294.
- DSAK IAI. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Hepp, G. W. dan W. Thomas. 1983. Accounting Standards Overload: Relief Is Needed. *Journal of Accountancy* 5(153): 52-58.
- IAPI. 2011. *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik: ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN PT ETAP INDONESIA*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Jonas G. J. dan S. J. Young. 1998. Bridging the Gap: Who Can Bring a User Focus to Business Reporting. *Accounting Horizons* 12(2): 154-169.
- Kelley, T. P. 1982. Accounting Standards Overload-Time for Action?, *The CPA Journal* May(52): 10-17.
- Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2014. *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

- Kilic, M., A. Uyar, dan B. Ataman. 2014. Preparedness For and Perception of IFRS for SMEs: Evidence From Turkey. *Accounting and Management Information Systems* 13(3): 492-519.
- Khafid, M. 2010. Analisis PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Usaha pada KPRI. *Dinamika Akuntansi* 2(1): 37-45.
- Knutson, D. L. dan H. Wichmann Jr. 1985. The Issue of Differential Accounting Treatment For American Small Businesses, *Management Forum* 11(9): 1-101.
- Kuncoro, M. 2000. *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*. Paper dipresentasikan pada Seminar Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia, Yogyakarta.
- Kurnianto, S., I. M. Narsa, dan A. W. Mardiyuwono. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Jurnal Majalah Ekonomi* XXII(3): 204-214.
- Mullerova, L., M. Pasekova dan E. Hyblova. 2010. Harmonization of Financial Reporting of Small and Medium-Sized Enterprises in The Czech Republic. *Journal of Modern Accounting and Auditing* (6)(1): 55-64.
- Nair, R. D. dan L. E. Rittenberg. 1982. Privately Held Businesses: Is There a Standards Overload, *Journal of Accountancy* 155(2): 83.
- Navarro-Garcia, J. C. dan F. Bastida. 2010. An Empirical Insight on Spanish Listed Companies' Perceptions of International Financial Reporting Standards. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 19(2): 110-120.
- Othcere, F. A. dan J. Agbeibor. 2012. The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMES): Suitability for small businesses in Ghana. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 10(2): 190-214.
- Pinasti, M. 2007. Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pemilik UKM Atas Informasi Akuntansi: Suatu Riset Eksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 10(3): 321-331.
- Prayudi, M. A. dan I. M. Narsa. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Nasional Pada Organisasi Nirlaba Bidang Sosial Kemanusiaan di Bali. *Jurnal Akuntansi & Investasi* 16(2): 110-120.
- Purwati, A. S., I. Suparlinah, dan N. Putri. 2014. The Use of Accounting Information in The Business Decision Making Process on Small and Medium Enterprises in Banyumas Region, Indonesia. *Economy Transdisciplinarity Cognition* 17(2): 63-75.
- Rachmawati, R. 2011. Implementation of IFRS FOR SME's in Indonesia (Case Study on Rural Banks). *GSTF Business Review (GBR)* 1(2): 56-59.
- Ram, R. dan S. Newberry. 2013. IFRS for SMEs: The IASB's Due Process. *Australian Accounting Review* 23(1): 3-17.
- Rezaee, Z. dan E. J. Burton. 1997. Forensic Accounting Education: Insights from Academicians and Certified Fraud Examiner Practitioners. *Managerial Auditing Journal* 12(9): 479-489.
- _____, L. M. Smith, dan J. Z. Szendi. 2010. Convergence in Accounting Standards: Insights from Academicians and Practitioners. *Advances in Accounting* 26(1): 142-154.
- Rudiantoro, R. dan S. V. Siregar. 2012. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9(1): 1-21
- Schuetze, W. 1991. Keep It Simple. *Accounting Horizons* 5(2): 113-117.
- Siam, W. Z. dan M. Y. Rahahleh. 2010. Implications of Applying the International Financial Reporting Standards (IFRSs) for Small and Medium-Sized Enterprises on The Accounting Envi-

- ronment in Jordan. *Journal of Accounting, Business and Management* 17(2): 21-33.
- Spencer-Rodgers, M. J., D. L. Williams, K. Hamilton, dan L. Wang. 2007. Culture and Group Perception: Dispositional and Stereotypic Inferences about Novel and National Groups. *Journal of Personality and Social Psychology* 93(4): 525-543.
- Supriyati dan P. Wulanditya. 2012. The SME Perception towards the Accounting Standard without Public Accountability (SAK ETAP) and Self-Assessment System for Increasing Voluntary Tax Compliance. *IAMURE International Journal of Business and Management* 4(10): 1-19.
- Sutarto, I. dan Habbiburahman. 2008. Accountability Influence, Technical Difficulty, and Measurement Difficulty Towards The Implementation of Indonesian Standard Statement of Financial Accounting (PSAK) No. 27 (Revised 1998) about Cooperatives Accounting in East Java. *Majalah Ekonomi* XVIII(2): 1-18.
- Thompson, J. A. dan A. Hurdman. 1983. Accounting Standards Overload: Some Recommendations. *Journal of Accountancy* 7(156): 105-112.
- Tudor, A. T. dan A. Mutiu. 2008. Pro and Contra Opinions Regarding a SME Accounting Standard. *Journal of Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 1(10): 1-12.
- Wahdini, S. 2006. *Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil dan Menengah*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Wirahardja, R. I. dan E.T. Wahyuni. 2009. Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK. *Majalah Akuntan Indonesia*, 19.
- Wyk, HA. dan J. Rossouw. 2009. IFRS for SMEs in South Africa: A Giant Leap for Accounting, but Too Big For Smaller Entities in General. *Mediatari Accountancy Research* 17(1): 99-116.